

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang fungsi dan perana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batusari, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batusari, Kepala Desa Batusari, anggota Perangkat Desa serta beberapa masyarakat desa yang juga ikut terlibat. Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batusari yaitu kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap fungsinya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi dalam pembuatan regulasi juga belum terlaksana dan terealisasi, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasannya belum berperan dengan baik karena belum mampu memperbaiki kinerja pemerintah desa yang belum transparan serta belum maksimal dalam menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pelaksanaan Pemerintahan

ABSTRACT

This study is conducted to obtain an overview of the Functions and Runctions of the Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in the implementation of government in Batusari Village, Mranggen District, Demak Regency. Based on the problems formulation, the methods and type of this study used descriptive qualitative research. Subjects in this study are the Chairperson of the Village Consultative Body (BPD) Batusari, Member of the Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Batusari, Village Chief of Batusari, Village Device members and several society who were also involved. The instrument of this study is the author himself. Data collection method is by interview and observation. The data analysis technique used is interactive analysis which includes the data collection, data reduction, data presentation and conclusion.

From the results of the study there are still have weaknesses in the supervision of the village regulations carried out by the Batusari Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD), which are the lack of understanding of the Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD) members on their function of discussing and agreeing on the Draft Village Regulation, accommodating the aspirations of the community, and supervising the performance of the Village Chief of Batusari. The function in regulating also has not been implemented and realized, the function of accommodating the aspirations of the community and monitoring the performance of the Village Head is also not optimal in its implementation due to the lack of understanding of the Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD) members on their jobs and functions based on applicable regulations.

It can be conclude that the Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in carrying out its supervisory function has not work as well because it has not been able to improve the performance of the village government which has not been transparent and has not been maximized in exploring and delivering the aspirations of the society.

Keywords: *Role, Village Consultative Body or Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Government Implementation*